



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Kalurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
2. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

4. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kalurahan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan

Pasal 4

- (1) Jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.103.398.250,00 (dua puluh enam milyar seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bagian dari hasil Pajak Daerah sebesar Rp22.191.229.940,00 (dua puluh dua milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); dan
 - b. bagian dari hasil Retribusi Daerah sebesar Rp3.912.168.310,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (2) Penentuan jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan untuk setiap Kalurahan diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap I dan tahap II.
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kalurahan; dan
 2. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional;

- (3) Perhitungan besaran bagian dari hasil Pajak Daerah secara proporsional mengacu pada besaran pajak yang diterima pada tahun 2021 oleh masing-masing Kalurahan terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (4) Besaran bagian dari hasil Retribusi Daerah tahun 2022 baik secara merata maupun proporsional yang diterima masing-masing Kalurahan sama dengan besaran bagi hasil retribusi tahun 2021.

Bagian Ketiga

Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan penentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Kalurahan.
- (2) Besaran bagian dari hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran bagian dari hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan

Pasal 6

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai antara lain:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan/atau
 - e. bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan.
- (2) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat untuk membiayai honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT).
- (3) Besaran honorarium yang diterima masing-masing Ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (4) Pemberian honorarium Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setiap bulan, triwulan, semesteran, setahun sekali atau setiap adanya ketugasan khusus dari Pemerintah Kalurahan yang harus diselesaikan oleh Ketua RT.

Bagian Kelima
Pencairan

Pasal 7

- (1) Pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. tahap I dicairkan pada bulan April Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. tahap II dicairkan pada bulan September Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur persyaratan sebagai berikut:
 - a. tahap I harus melunasi PBB-P2 untuk tanah Kalurahan yang terdiri atas tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak 2021; dan
 - b. tahap II harus melunasi PBB-P2 untuk tanah Kalurahan yang terdiri atas tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak 2022.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I diatur sebagai berikut:
- a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu III (ketiga) bulan April tahun berjalan dengan dilampiri dokumen persyaratan yaitu:
 1. fotokopi Rekening Kas Kalurahan pada Bank Umum;
 2. bukti pengeluaran kas;
 3. kuitansi;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Kalurahan; dan
 5. fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak 2021 yang telah divalidasi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul cq. Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
 - b. berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat minggu IV (keempat) bulan April tahun berjalan, Panewu mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati cq. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri:
 1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
 2. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan; dan
 3. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Mekanisme pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II diatur sebagai berikut:
- a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu II (kedua) bulan September tahun berjalan dengan dilampiri dokumen persyaratan yaitu:
 1. fotokopi Rekening Kas Kalurahan pada Bank Umum;
 2. bukti pengeluaran kas;
 3. kuitansi;
 4. fotokopi NPWP Pemerintah Kalurahan; dan

5. fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak 2022 yang telah divalidasi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul cq. Bidang Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
 - b. berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat minggu III (ketiga) bulan September tahun berjalan, Panewu mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku PPKD, dengan dilampiri:
 1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
 2. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan; dan
 3. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan transfer Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah langsung ke Rekening Kas Kalurahan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kalurahan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 April 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 29



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2022

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH PER KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KALURAHAN	BAGI RATA (60%) (Rp)	BOBOT VARIABEL (%)	BAGI PROPORSIONAL (40%) (Rp)	JUMLAH BAGI HASIL DITERIMA (Rp)	ALOKASI TAHAP I (Rp)	ALOKASI TAHAP II (Rp)
1	PONCOSARI	177,529,800	0.75%	66,447,900	243,977,700	121,988,850	121,988,850
2	TRIMURTI	177,529,800	0.66%	58,954,500	236,484,300	118,242,150	118,242,150
3	GADINGSARI	177,529,800	0.44%	38,933,100	216,462,900	108,231,450	108,231,450
4	GADINGHARJO	177,529,800	0.21%	18,993,600	196,523,400	98,261,700	98,261,700
5	SRIGADING	177,529,800	0.65%	57,721,600	235,251,400	117,625,700	117,625,700
6	MURTIGADING	177,529,800	0.55%	48,717,400	226,247,200	113,123,600	113,123,600

NO	KALURAHAN	BAGI RATA (60%) (Rp)	BOBOT VARIABEL (%)	BAGI PROPORSIONAL (40%) (Rp)	JUMLAH BAGI HASIL DITERIMA (Rp)	ALOKASI TAHAP I (Rp)	ALOKASI TAHAP II (Rp)
7	TIRTOHARGO	177,529,800	0.18%	15,876,400	193,406,200	96,703,100	96,703,100
8	PARANGTRITIS	177,529,800	0.45%	40,022,400	217,552,200	108,776,100	108,776,100
9	DONOTIRTO	177,529,800	0.47%	41,314,100	218,843,900	109,421,950	109,421,950
10	TIRTOSARI	177,529,800	0.14%	12,315,400	189,845,200	94,922,600	94,922,600
11	TIRTOMULYO	177,529,800	0.24%	20,972,200	198,502,000	99,251,000	99,251,000
12	SELOHARJO	177,529,800	0.32%	28,459,400	205,989,200	102,994,600	102,994,600
13	PANJANGREJO	177,529,800	0.55%	48,841,000	226,370,800	113,185,400	113,185,400
14	SRIHARDONO	177,529,800	0.46%	41,052,300	218,582,100	109,291,050	109,291,050
15	SIDOMULYO	177,529,800	0.50%	44,293,400	221,823,200	110,911,600	110,911,600
16	MULYODADI	177,529,800	0.45%	40,080,600	217,610,400	108,805,200	108,805,200
17	SUMBERMULYO	177,529,800	0.64%	56,666,800	234,196,600	117,098,300	117,098,300
18	CATURHARJO	177,529,800	0.37%	32,867,900	210,397,700	105,198,850	105,198,850
19	TRIHARJO	177,529,800	0.73%	64,602,900	242,132,700	121,066,350	121,066,350
20	GILANGHARJO	177,529,800	0.97%	86,532,000	264,061,800	132,030,900	132,030,900
21	WIJIREJO	177,529,800	0.76%	67,399,100	244,928,900	122,464,450	122,464,450

NO	KALURAHAN	BAGI RATA (60%) (Rp)	BOBOT VARIABEL (%)	BAGI PROPORSIONAL (40%) (Rp)	JUMLAH BAGI HASIL DITERIMA (Rp)	ALOKASI TAHAP I (Rp)	ALOKASI TAHAP II (Rp)
22	PALBAPANG	177,529,800	1.14%	101,108,500	278,638,300	139,319,150	139,319,150
23	RINGINHARJO	177,529,800	0.85%	75,704,900	253,234,700	126,617,350	126,617,350
24	BANTUL	177,529,800	2.21%	196,483,100	374,012,900	187,006,450	187,006,450
25	TRIRENGGO	177,529,800	1.90%	168,806,500	346,336,300	173,168,150	173,168,150
26	SABDODADI	177,529,800	0.78%	69,088,400	246,618,200	123,309,100	123,309,100
27	PATALAN	177,529,800	0.62%	55,136,400	232,666,200	116,333,100	116,333,100
28	C A N D E N	177,529,800	0.43%	38,106,300	215,636,100	107,818,050	107,818,050
29	SUMBERAGUNG	177,529,800	0.87%	77,172,500	254,702,300	127,351,150	127,351,150
30	TRIMULYO	177,529,800	0.92%	82,106,200	259,636,000	129,818,000	129,818,000
31	SELOPAMIORO	177,529,800	0.26%	23,470,100	200,999,900	100,499,950	100,499,950
32	SRIHARJO	177,529,800	0.30%	26,509,000	204,038,800	102,019,400	102,019,400
33	KEBONAGUNG	177,529,800	0.15%	13,109,300	190,639,100	95,319,550	95,319,550
34	KARANGTENGAH	177,529,800	0.24%	21,341,700	198,871,500	99,435,750	99,435,750
35	GIRIREJO	177,529,800	0.19%	16,892,300	194,422,100	97,211,050	97,211,050

NO	KALURAHAN	BAGI RATA (60%) (Rp)	BOBOT VARIABEL (%)	BAGI PROPORSIONAL (40%) (Rp)	JUMLAH BAGI HASIL DITERIMA (Rp)	ALOKASI TAHAP I (Rp)	ALOKASI TAHAP II (Rp)
36	KARANGTALUN	177,529,800	0.26%	23,078,800	200,608,600	100,304,300	100,304,300
37	IMOGIRI	177,529,800	0.24%	21,025,300	198,555,100	99,277,550	99,277,550
38	WUKIRSARI	177,529,800	0.52%	45,970,400	223,500,200	111,750,100	111,750,100
39	MANGUNAN	177,529,800	0.26%	23,225,100	200,754,900	100,377,450	100,377,450
40	MUNTUK	177,529,800	0.13%	11,823,400	189,353,200	94,676,600	94,676,600
41	DLINGO	177,529,800	0.11%	9,910,900	187,440,700	93,720,350	93,720,350
42	TEMUWUH	177,529,800	0.16%	14,397,900	191,927,700	95,963,850	95,963,850
43	JATIMULYO	177,529,800	0.10%	8,548,700	186,078,500	93,039,250	93,039,250
44	TERONG	177,529,800	0.23%	20,006,700	197,536,500	98,768,250	98,768,250
45	WONOKROMO	177,529,800	1.50%	132,777,000	310,306,800	155,153,400	155,153,400
46	PLERET	177,529,800	1.68%	149,490,900	327,020,700	163,510,350	163,510,350
47	SEGOROYOSO	177,529,800	0.48%	42,920,700	220,450,500	110,225,250	110,225,250
48	BAWURAN	177,529,800	0.75%	66,243,000	243,772,800	121,886,400	121,886,400
49	WONOLELO	177,529,800	0.18%	15,859,100	193,388,900	96,694,450	96,694,450

NO	KALURAHAN	BAGI RATA (60%) (Rp)	BOBOT VARIABEL (%)	BAGI PROPORSIONAL (40%) (Rp)	JUMLAH BAGI HASIL DITERIMA (Rp)	ALOKASI TAHAP I (Rp)	ALOKASI TAHAP II (Rp)
50	SITIMULYO	177,529,800	2.17%	192,766,900	370,296,700	185,148,350	185,148,350
51	SRIMULYO	177,529,800	1.60%	141,871,100	319,400,900	159,700,450	159,700,450
52	SRIMARTANI	177,529,800	0.87%	77,221,400	254,751,200	127,375,600	127,375,600
53	TAMANAN	177,529,800	2.52%	223,494,300	401,024,100	200,512,050	200,512,050
54	JAGALAN	177,529,800	0.27%	23,955,900	201,485,700	100,742,850	100,742,850
55	SINGOSAREN	177,529,800	0.45%	39,654,500	217,184,300	108,592,150	108,592,150
56	WIROKERTEN	177,529,800	2.66%	235,847,700	413,377,500	206,688,750	206,688,750
57	JAMBIDAN	177,529,800	1.55%	137,542,900	315,072,700	157,536,350	157,536,350
58	POTORONO	177,529,800	3.14%	278,967,000	456,496,800	228,248,400	228,248,400
59	BATURETNO	177,529,800	3.34%	296,587,500	474,117,300	237,058,650	237,058,650
60	BANGUNTAPAN	177,529,800	7.65%	679,303,600	856,833,400	428,416,700	428,416,700
61	PENDOWOHARJO	177,529,800	2.34%	207,420,440	384,950,240	192,475,120	192,475,120
62	TIMBULHARJO	177,529,800	3.23%	286,894,200	464,424,000	232,212,000	232,212,000
63	BANGUNHARJO	177,529,800	5.42%	480,826,400	658,356,200	329,178,100	329,178,100

NO	KALURAHAN	BAGI RATA (60%) (Rp)	BOBOT VARIABEL (%)	BAGI PROPORSIONAL (40%) (Rp)	JUMLAH BAGI HASIL DITERIMA (Rp)	ALOKASI TAHAP I (Rp)	ALOKASI TAHAP II (Rp)
64	PANGGUNG HARJO	177,529,800	3.63%	322,581,800	500,111,600	250,055,800	250,055,800
65	BANGUNJIWO	177,529,800	6.49%	575,664,900	753,194,700	376,597,350	376,597,350
66	TIRTONIRMOLO	177,529,800	2.82%	250,332,300	427,862,100	213,931,050	213,931,050
67	TAMANTIRTO	177,529,800	4.27%	379,297,200	556,827,000	278,413,500	278,413,500
68	NGESTIHARJO	177,529,800	6.64%	589,408,900	766,938,700	383,469,350	383,469,350
69	TRIWIDADI	177,529,800	1.00%	88,869,700	266,399,500	133,199,750	133,199,750
70	SENDANGSARI	177,529,800	1.19%	105,900,000	283,429,800	141,714,900	141,714,900
71	GUWOSARI	177,529,800	1.06%	94,265,800	271,795,600	135,897,800	135,897,800
72	ARGODADI	177,529,800	1.32%	117,075,000	294,604,800	147,302,400	147,302,400
73	ARGOREJO	177,529,800	2.27%	201,198,700	378,728,500	189,364,250	189,364,250
74	ARGOSARI	177,529,800	1.06%	93,720,400	271,250,200	135,625,100	135,625,100
75	ARGOMULYO	177,529,800	3.09%	274,449,300	451,979,100	225,989,550	225,989,550
JUMLAH		13,314,735,000	100.00%	8,876,494,940	22,191,229,940	11,095,614,970	11,095,614,970

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN
 BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH PER KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	DESA	BOBOT	BAGI RATA	BAGI PROPORSIONAL	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II
1	PONCOSARI	4.514%	31,297,300.00	70,640,000.00	101,937,300.00	50,968,650.00	50,968,650.00
2	TRIMURTI	0.156%	31,297,300.00	2,441,000.00	33,738,300.00	16,869,150.00	16,869,150.00
3	GADINGSARI	4.654%	31,297,300.00	72,830,000.00	104,127,300.00	52,063,650.00	52,063,650.00
4	GADINGHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
5	SRIGADING	4.600%	31,297,300.00	71,990,000.00	103,287,300.00	51,643,650.00	51,643,650.00
6	MURTIIGADING	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
7	TIRTOHARGO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00

NO	DESA	BOBOT	BAGI RATA	BAGI PROPORSIONAL	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II
8	PARANGTRITIS	73.487%	31,297,300.00	1,150,000,000.00	1,181,297,300.00	590,648,650.00	590,648,650.00
9	DONOTIRTO	0.414%	31,297,300.00	6,476,000.00	37,773,300.00	18,886,650.00	18,886,650.00
10	TIRTOSARI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
11	TIRTOMULYO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
12	SELOHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
13	PANJANGREJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
14	SRIHARDONO	0.166%	31,297,300.00	2,601,000.00	33,898,300.00	16,949,150.00	16,949,150.00
15	SIDOMULYO	0.094%	31,297,300.00	1,479,000.00	32,776,300.00	16,388,150.00	16,388,150.00
16	MULYODADI	0.018%	31,297,300.00	285,400.00	31,582,700.00	15,791,350.00	15,791,350.00
17	SUMBERMULYO	0.093%	31,297,300.00	1,457,000.00	32,754,300.00	16,377,150.00	16,377,150.00
18	CATURHARJO	0.052%	31,297,300.00	808,900.00	32,106,200.00	16,053,100.00	16,053,100.00
19	TRIHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
20	GILANGHARJO	0.145%	31,297,300.00	2,271,000.00	33,568,300.00	16,784,150.00	16,784,150.00
21	WIJIREJO	0.344%	31,297,300.00	5,379,000.00	36,676,300.00	18,338,150.00	18,338,150.00
22	TRIWIDADI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00

NO	DESA	BOBOT	BAGI RATA	BAGI PROPORSIONAL	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II
23	SENDANGSARI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
24	GUWOSARI	0.590%	31,297,300.00	9,226,000.00	40,523,300.00	20,261,650.00	20,261,650.00
25	PALBAPANG	0.080%	31,297,300.00	1,250,000.00	32,547,300.00	16,273,650.00	16,273,650.00
26	RINGINHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
27	BANTUL	1.874%	31,297,300.00	29,320,000.00	60,617,300.00	30,308,650.00	30,308,650.00
28	TRIRENGGO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
29	SABDODADI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
30	PATALAN	0.005%	31,297,300.00	40,910.00	31,338,210.00	15,669,105.00	15,669,105.00
31	CANDEN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
32	SUMBERAGUNG	0.251%	31,297,300.00	3,920,000.00	35,217,300.00	17,608,650.00	17,608,650.00
33	TRIMULYO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
34	SELOPAMIORO	0.104%	31,297,300.00	1,627,000.00	32,924,300.00	16,462,150.00	16,462,150.00
35	SRIHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
36	WUKIRSARI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
37	KEBONAGUNG	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00

NO	DESA	BOBOT	BAGI RATA	BAGI PROPORSIONAL	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II
38	KARANGTENGAH	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
39	GIRIREJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
40	KARANGTALUN	0.154%	31,297,300.00	2,414,000.00	33,711,300.00	16,855,650.00	16,855,650.00
41	IMOGIRI	1.249%	31,297,300.00	19,550,000.00	50,847,300.00	25,423,650.00	25,423,650.00
42	MANGUNAN	3.608%	31,297,300.00	56,470,000.00	87,767,300.00	43,883,650.00	43,883,650.00
43	MUNTUK	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
44	DLINGO	0.084%	31,297,300.00	1,319,000.00	32,616,300.00	16,308,150.00	16,308,150.00
45	TEMUWUH	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
46	TERONG	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
47	JATIMULYO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
48	BATURETNO	0.153%	31,297,300.00	2,396,000.00	33,693,300.00	16,846,650.00	16,846,650.00
49	BANGUNTAPAN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
50	JAGALAN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
51	SINGOSAREN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
52	JAMBIDAN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00

NO	DESA	BOBOT	BAGI RATA	BAGI PROPORSIONAL	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II
53	POTORONO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
54	TAMANAN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
55	WIROKERTEN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
56	WONOKROMO	0.165%	31,297,300.00	2,587,000.00	33,884,300.00	16,942,150.00	16,942,150.00
57	PLERET	0.388%	31,297,300.00	6,066,000.00	37,363,300.00	18,681,650.00	18,681,650.00
58	SEGOROYOSO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
59	BAWURAN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
60	WONOLELO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
61	SITIMULYO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
62	SRIMULYO	1.251%	31,297,300.00	19,580,000.00	50,877,300.00	25,438,650.00	25,438,650.00
63	SRIMARTANI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
64	PENDOWOHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
65	TIMBULHARJO	0.243%	31,297,300.00	3,801,000.00	35,098,300.00	17,549,150.00	17,549,150.00
66	BANGUNHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
67	PANGGUNGHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00

NO	DESA	BOBOT	BAGI RATA	BAGI PROPORSIONAL	JUMLAH	TAHAP I	TAHAP II
68	BANGUNJIWO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
69	TIRTONIRMOLO	0.860%	31,297,300.00	13,450,000.00	44,747,300.00	22,373,650.00	22,373,650.00
70	TAMANTIRTO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
71	NGESTIHARJO	0.050%	31,297,300.00	783,600.00	32,080,900.00	16,040,450.00	16,040,450.00
72	ARGODADI	0.067%	31,297,300.00	1,050,000.00	32,347,300.00	16,173,650.00	16,173,650.00
73	ARGOREJO	0.087%	31,297,300.00	1,362,000.00	32,659,300.00	16,329,650.00	16,329,650.00
74	ARGOSARI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
75	ARGOMULYO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00	15,648,650.00	15,648,650.00
JUMLAH		1.00000	2,347,297,500.00	1,564,870,810.00	3,912,168,310.00	1,956,084,155.00	1,956,084,155.00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH